

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertahanan negara yang kuat sangatlah penting bagi setiap negara di dunia. Suatu negara dikatakan memiliki pertahanan yang kuat manakala bangsa tersebut bersatu padu untuk selalu mempertahankan dan memperjuangkan serta melindungi hak-hak warga negaranya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pasal 1 ayat (1), “Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara”. Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar didunia tentunya harus memiliki pertahanan negara yang kuat.

Wilayah Indonesia meliputi udara, darat dan perairan yang sangat luas serta pada posisi yang strategis (posisi silang) dengan jumlah penduduk yang besar dan mempunyai sumber kekayaan alam yang berlimpah, dengan modal dasar pembangunan itu, Indonesia mempunyai potensi untuk menjadi bangsa dan negara besar. Menurut (Rokhman, Hum, Syaifudin, & Yuliati, 2014), potensi Indonesia kedepan adalah sebagai berikut:

Indonesia is one of emerging countries which are predicted to have bright economic development. It is predicted that Indonesian economic development will dominate the world economic development in 2025. It is also predicted also that Indonesia will be a great industrial country in 2045. A book called Megachange 50 published by The Economist also predicted the similar notion; Indonesia will be a developed country with the total income around US \$ 24.000 in 2050.

Potensi sumber daya alam, letak geografis, dan potensi lainnya yang dimiliki oleh Indonesia tentunya bisa menjadi suatu ancaman atau keuntungan bagi bangsa. Negara lain pasti akan berusaha maksimal untuk mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dari negara Indonesia, melihat berbagai potensi menguntungkan yang ada di Indonesia. Potensi tersebut menjadi keuntungan bagi bangsa Indonesia manakala bisa dikelola secara mandiri oleh negara dan bermanfaat bagi masyarakat.

Ancaman terhadap pertahanan negara dapat berbentuk ancaman militer dan ancaman non militer. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara pasal 7 ayat (2) “Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai Komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung”. Sedangkan, “Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara pasal 7 ayat (2))”.

Globalisasi yang sedang berkembang sangat pesat saat ini telah membuat terjadinya pergeseran ancaman terhadap pertahanan negara, sebagaimana dijelaskan oleh Febrinanto dkk (2017:69) sebagai berikut:

Pada konteks Indonesia, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan pun ikut mengalami pergeseran. Ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia bukan lagi dalam bentuk agresi militer akan tetapi berupa penjajahan ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya. Di sinilah globalisasi memegang peranan sebagai pembawa arus ancaman tersebut dari luar menuju ke Indonesia.

Ancaman dan tantangan bangsa Indonesia saat ini pun berbeda ketika akan memerdekakan negara Indonesia dari para penjajah. Terlebih akibat adanya arus globalisasi yang tidak bisa dicegah tersebut telah memberikan perubahan yang sangat berarti dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Salah satu upaya untuk mencegah ancaman terhadap pertahanan negara tersebut, maka dilakukan upaya bela negara. Upaya bela negara wajib dilakukan dalam kerangka pembinaan kesadaran bela negara sebagai sebuah usaha untuk mewujudkan warga negara Indonesia yang memahami dan menghayati serta yakin untuk menunaikan hak dan kewajibannya. Bangsa Indonesia ingin pula mempunyai peradaban yang unggul dan mulia. *“Indonesian vision 2045 to be a developed and strong country is a strong intension which needs support from all people of Indonesia* (Rokhman et al., 2014). Peradaban demikian dapat dicapai apabila masyarakat dan

bangsa kita juga adalah masyarakat dan bangsa baik (*good society and nation*), damai, adil dan sejahtera.

Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi (Undang-undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 ayat (2)). Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang aktif berpartisipasi, sebagaimana dijelaskan (Bruen, 2013) sebagai berikut :

civic, social and political education aims to prepare students for active participatory citizenship. This is achieved through comprehensive exploration of the civic, social and political dimensions of their lives at a time when pupils are developing from dependent children into independent young adults.

“The ultimate goal of civic education is to encourage the ability and willingness of political participation by providing information and the basis to make conscientious judgments, which is characterized as a "political rationality" (Yoldaş, 2015). Pendidikan kewarganegaraan juga memiliki tujuan akhir untuk mendorong kemampuan dan kemauan partisipasi politik.

Selain melalui pendidikan kewarganegaraan, penanaman bela negara juga dapat dilakukan melalui pendidikan non formal. Salah satu contoh penanaman nilai bela negara dalam pendidikan non formal yaitu melalui Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka, adalah nama organisasi pendidikan di luar sekolah dan di luar keluarga yang menggunakan Prinsip Dasar Pendidikan Kepramukaan dan Metode Pendidikan Kepramukaan. Pendidikan kepramukaan merupakan nama kegiatan anggota Gerakan Pramuka. Ketangguhan iptek/teknologi dalam Gerakan Pramuka dibina dan dikembangkan dalam satuan khusus yaitu Satuan Karya Pramuka (Saka). Saka, di lingkungan *World Scouting* disebut *Scout Service Brigade*, merupakan suatu wadah pendidikan guna menyalurkan minat, mengembangkan bakat dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan pengalaman Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega dalam berbagai bidang kejuruan/teknologi. Salah satu jenis saka dalam Gerakan Pramuka yaitu Saka Wira Kartika.

Saka Wira Kartika merupakan satuan karya di bidang Pertahanan yang berada di lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Saka Wira Kartika memiliki peran yang sangat strategis dan penting dalam implementasi nilai bela negara bagi generasi muda. Setiap kota/kabupaten pada umumnya memiliki Saka Wira Kartika yang berada di tingkat Kodim hingga Koramil. Implementasi nilai bela negara pada pendidikan kepramukaan di Saka Wira Kartika tentunya memiliki cara ataupun metode tersendiri. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perlu dilakukan penelitian tentang “Implementasi Nilai Bela Negara pada Pendidikan Kepramukaan di Satuan Karya Wira Kartika Kodim 0710/Pekalongan Tahun 2018”.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan bagian terpenting yang harus ada dalam penulisan karya ilmiah. Setiap peneliti sebelum melakukan penelitian harus mengetahui terlebih dahulu pokok permasalahan yang ada. Adanya perumusan masalah tersebut diharapkan proses pemecahan permasalahan dapat terinci dengan jelas, terarah, dan terfokus. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana proses implementasi nilai bela negara pada pendidikan kepramukaan di satuan karya Wira Kartika Kodim 0710/Pekalongan Tahun 2018?
- b. Apa kendala atau hambatan dalam proses implementasi nilai bela negara pada pendidikan kepramukaan di satuan karya Wira Kartika Kodim 0710/Pekalongan Tahun 2018?
- c. Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala atau hambatan dalam proses implementasi nilai bela negara pada pendidikan kepramukaan di satuan karya Wira Kartika Kodim 0710/Pekalongan Tahun 2018?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan titik pijak dalam merealisasikan aktivitas yang akan dilaksanakan, sehingga harus dirumuskan secara jelas. Tujuan Penelitian berfungsi sebagai acuan pokok terhadap masalah yang akan diteliti. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan proses implementasi nilai bela negara pada pendidikan kepramukaan di satuan karya Wira Kartika Kodim 0710/Pekalongan Tahun 2018.
2. Untuk mendeskripsikan kendala atau hambatan dalam proses implementasi nilai bela negara pada pendidikan kepramukaan di satuan karya Wira Kartika Kodim 0710/Pekalongan Tahun 2018.
3. Untuk mendeskripsikan solusi mengatasi kendala atau hambatan dalam proses implementasi nilai bela negara pada pendidikan kepramukaan di satuan karya Wira Kartika Kodim 0710/Pekalongan Tahun 2018.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Mendapatkan teori baru tentang proses implementasi nilai bela negara pada pendidikan kepramukaan di satuan karya Wira Kartika Kodim 0710/Pekalongan Tahun 2018.
- b. Menambah wawasan dan pemahaman bagi guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mengenai manfaat implementasi nilai bela negara pada pendidikan kepramukaan di satuan karya Wira Kartika Kodim 0710/Pekalongan Tahun 2018.
- c. Kajian ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk kegiatan penelitian selanjutnya yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi peneliti, menambah wawasan dan pengalaman mengenai implementasi nilai bela negara di Saka Wira Kartika Kodim 0710/Pekalongan.
- b. Manfaat bagi satuan karya Wira Kartika, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan pengembangan implementasi nilai bela negara lebih baik.
- c. Manfaat bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam memahami implementasi nilai bela negara di Saka Wira Kartika Kodim 0710/Pekalongan.